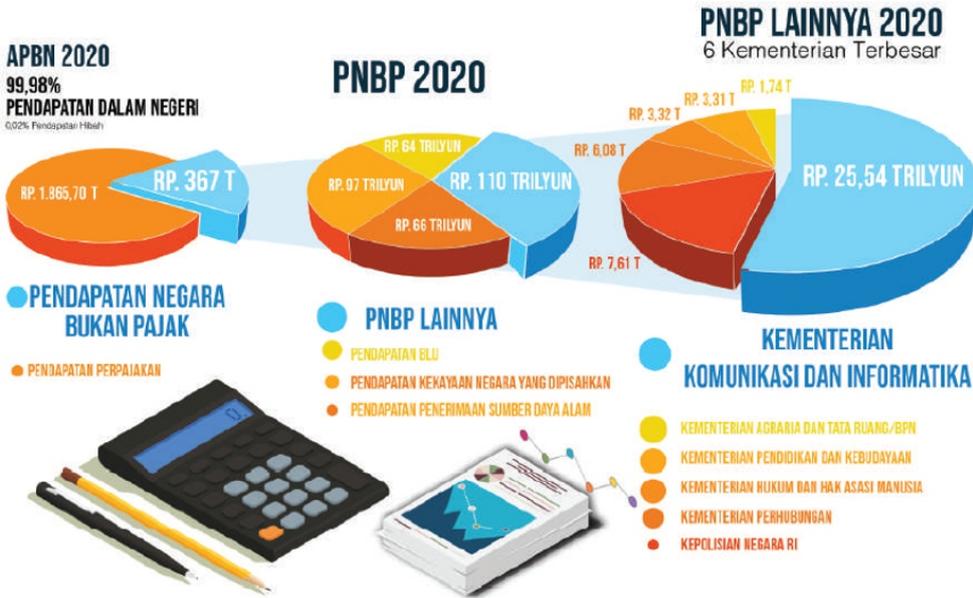


POTENSI DAN TANTANGAN OPTIMALISASI PNBP BIDANG SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL

PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Proporsi PNBP Kemenkominfo Dalam APBN 2020

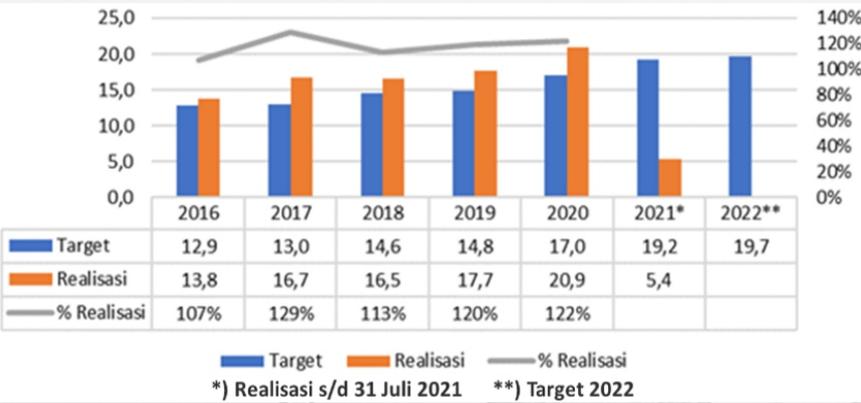


Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kemenkominfo memiliki porsi yang besar dan strategis dalam struktur APBN khususnya pada pos PNBP lainnya. Kemenkominfo menjadi salah satu penyumbang PNBP terbesar. Selain itu, perlu kita ketahui bersama bahwa dari total Rp25,54 triliun PNBP Kemenkominfo pada tahun 2020, sebesar 82% atau Rp20,9 triliun disumbang dari hasil pengelolaan frekuensi (PNBP yang berasal dari BHP Frekuensi, sertifikasi perangkat telekomunikasi, dan sertifikasi operator radio).

Perkembangan PNBP dalam Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio

PNBP Ditjen SDPPI Tahun 2016-2022

(dalam triliun rupiah)



Pengelolaan frekuensi selama ini dilakukan oleh Kemenkominfo, lebih tepatnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Pengelolaan Perangkat Informatika (Ditjen SDPPI). PNBP frekuensi ditopang oleh BHP Frekuensi, yaitu sebesar 99% dari total PNBP Ditjen SDPPI. Selama 4 tahun terakhir realisasi hampir selalu diatas 120%, dengan pengecualian di tahun 2018 karena ada penyesuaian ketentuan. Sementara untuk target tahun 2022 naik 3% dari target 2021. Target PNBP SDPPI mengalami kenaikan rata-rata sebesar 9% per tahun.

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	BHP Frekuensi	Standarisasi	REOR dan SKOR	IAR dan IKRAP	Lain-Lain	Total PNBP	Target
2016	Rp 13.699.394.770	Rp 139.085.785	Rp 107.890	Rp 3.320.333	Rp 3.812.234	Rp 13.845.721.012	Rp 12.970.390.955
2017	Rp 16.559.804.470	Rp 191.909.921	Rp 458.812	Rp 3.165.680	Rp 3.857.488	Rp 16.759.196.371	Rp 13.027.784.508
2018	Rp 16.364.750.655	Rp 197.544.310	Rp 455.983	Rp 3.212.540	Rp 1.440.711	Rp 16.567.404.199	Rp 14.634.476.271
2019	Rp 17.605.970.108	Rp 182.322.483	Rp 447.254	Rp 3.390.028	Rp 2.232.547	Rp 17.794.362.420	Rp 14.884.463.682
2020	Rp 20.706.918.509	Rp 191.354.192	Rp 349.650	Rp 3.821.363	Rp 2.901.666	Rp 20.905.345.380	Rp 17.075.808.645

Potensi PNBP Bidang Spektrum Frekuensi Radio

Program Analog Switch Off (ASO)

Jika hasil *digital dividend* dari ASO dialokasikan untuk layanan telekomunikasi seluler, maka dapat mendatangkan berbagai multiplier effect terhadap perekonomian, yaitu 181 ribu penambahan kegiatan usaha baru, 232 ribu penambahan lapangan pekerjaan baru, Rp77 triliun peningkatan pendapatan negara, serta Rp443,8 triliun peningkatan kontribusi pada PDB nasional.

Peningkatan Jumlah BTS

Untuk mengakomodir kebutuhan layanan internet, jumlah BTS di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun. Kemenkominfo menargetkan pembangunan BTS di 7.904 desa/kelurahan yang belum pernah tersentuh akses 4G. Hal ini merupakan potensi besar Indonesia dalam meningkatkan PNBP dari BHP Frekuensi.

Implementasi Jaringan Internet 5G

Penerapan teknologi 5G akan meningkatkan PDB secara kumulatif dari 2021-2030 hingga 9,5% atau senilai Rp2.874 triliun. Selain itu penerapan 5G juga berpotensi menciptakan hingga 5,1 juta lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas per kapita sampai dengan Rp11 juta dalam periode yang sama.

Perkembangan Teknologi dan Perangkat Telekomunikasi

Perkembangan jenis dan model perangkat TIK yang bervariasi dari berbagai merek, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri juga akan berdampak pada peningkatan kebutuhan sertifikasi dan pengujian perangkat TIK tersebut

Tantangan

1 Penyalahgunaan Penggunaan Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi

2 Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Spektrum Frekuensi *Mobile Broadband*

3 Penetapan Target PNBK Kurang Akurat

4 Masih Ada Piutang PNBK yang Belum Dibayar

Masih ditemukan gangguan yang bersumber dari banyaknya penyalahgunaan frekuensi radio secara tanpa izin (ilegal). Catatan pada tahun 2020, Kemenkominfo berhasil melakukan klarifikasi dan penghentian 2.729 pancaran frekuensi tanpa izin atau ilegal. Kemenkominfo memiliki tantangan besar untuk dapat menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang bukan peruntukannya dan penggunaan perangkat yang belum tersertifikasi. Tentunya dengan dilakukannya penertiban penggunaan frekuensi dan perangkat telekomunikasi, masyarakat akan memiliki izin dan sertifikasi yang nantinya berpotensi dalam meningkatkan PNBK.

Indonesia masih memiliki kebutuhan spektrum frekuensi radio yang besar. Penyediaan spektrum frekuensi ditargetkan mencapai 2047MHz pada tahun 2024. Hingga tahun 2020, pemenuhan kebutuhan spektrum tersebut telah tercapai sebesar 737MHz. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saat ini ada 2 frekuensi yang bisa dioptimalkan. Frekuensi tersebut berada pada pita frekuensi 700 MHz dan 2600 MHz. Saat ini, frekuensi 700 MHz masih digunakan untuk siaran tv analog, Sementara frekuensi 2600 MHz saat ini masih digunakan oleh penyelenggara TV berbayar melalui satelit

Capaian realisasi PNBK pengelolaan SFR pada Ditjen SDPPI selalu jauh di atas target, bahkan hampir mencapai 130%. Gap yang terlalu jauh antara target dan realisasi menunjukkan adanya penetapan target yang kurang akurat. Padahal, akurasi dalam penetapan target sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan penetapan penggunaan anggaran PNBK di tahun berikutnya.

Tercatat masih adanya Piutang PNBK BHP Frekuensi radio senilai Rp1,4 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2020 naik 14% menjadi Rp1,6 triliun. Berbagai alasan melatarbelakangi piutang PNBK BHP Frekuensi, baik kondisi keuangan wajib bayar yang kurang stabil, maupun kepatuhan wajib bayar yang masih kurang baik dengan melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu.

Ada kecenderungan biaya lelang dan BHP Frekuensi yang dirasa terlalu tinggi bagi sebagian operator sehingga mempengaruhi cashflow perusahaan telekomunikasi tersebut.

Piutang Bukan Pajak Ditjen SDPPI (dalam ribuan rupiah)

No	Piutang	2018	2019	2020
1	Piutang PNBK BHP Frekuensi Radio	2.287.172.316	1.418.688.144	1.619.111.671
2	Piutang PNBK Sertifikasi	2.174.500	1.327.750	1.257.750
3	Piutang PNBK Lainnya	70.350	900.713	673.733
4	Piutang Lainnya	678.028	696.520	685.020
	Jumlah	2.290.095.194	1.421.613.127	1.621.728.174

Rekomendasi

Sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai dampak penggunaan spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi yang ilegal. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi melalui Balai Monitor di masing-masing daerah.

Upaya percepatan program *analog switch off* (ASO) perlu dioptimalkan. Pemerintah dapat terlebih dahulu memulai program ASO dari *rural area* yang memang saat ini sudah tidak menggunakan siaran analog. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi di wilayah-wilayah layanan ASO.

Pemerintah harus bersikap tegas kepada operator telekomunikasi yang kurang patuh dan memberikan potensi kerugian bagi negara. Melalui UU Ciptaker dan PP Poltesiar, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mencabut izin penyelenggaraan frekuensi yang tidak optimal.

Untuk mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi 2600MHz, pemerintah dapat membuka seleksi izin nasional dan lelang frekuensi 5G tanpa menunggu berakhirnya izin frekuensi operator BSS (*Broadcasting Satellite Service*) pada tahun 2024.

Pemerintah perlu mencari formula yang ideal agar harga lelang frekuensi 5G tidak terlalu mahal. Sehingga operator seluler tidak merasa keberatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya lelang beserta BHP Frekuensi, dan masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan 5G.